

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KETAHANAN PANGAN**  
**REGIONAL ASEAN**

Pada bab ketiga ini akan dijabarkan mengenai berbagai permasalahan atau isu-isu aktual yang terkait dengan ketahanan pangan yang terjadi di kawasan regional ASEAN sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan strategis sebagai solusi konstruktif dalam mengatasi masalah ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh umat manusia sebagai dampak dari terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Berbagai isu-isu sentral terkait dengan ketahanan pangan dapat memperkuat komitmen politik negara-negara ASEAN dalam menindaklanjuti prinsip-prinsip dan kerangka kerja AIFS sebagai pijakan bersama mengatasi masalah ketahanan pangan di kawasan regional ASEAN dan sebagai upaya menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang tangguh, kuat dan dinamis serta memberikan manfaat nyata dalam penyelesaian konstruktif dari setiap permasalahan yang terjadi.

**A. Isu-isu Sentral Terkait dengan Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN**

Secara umum terdapat hubungan positif antara perdagangan internasional dan keamanan pangan, yaitu melalui aktifitas perdagangan internasional dapat memberikan kepastian ketersediaan pasokan makanan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk).Di tingkat regional ASEAN, sejak periode 1970-an beberapa negara anggota ASEAN mengalami

peningkatan produksi bahan pangan secara signifikan sehingga mampu mewujudkan kemandirian dalam penyediaan pangan tanpa melalui mekanisme ekspor dan impor bahan pangan dari kawasan lain. Akan tetapi seiring terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, menyebabkan kapasitas produksi bahan pangan khususnya beras di beberapa negara ASEAN mengalami penurunan. Sejak dekade 1990-an, ASEAN menggalakkan kembali program pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berbasis agroindustri. Mekanisme kerjasama ASEAN terus digalakkan seiring mencuatnya isu ketahanan pangan yang didorong oleh terjadinya kesenjangan yang semakin melebar antara sisi permintaan dan persediaan bahan pangan ditambah dengan kondisi lingkungan alam yang mengalami kemerosotan kualitas dan daya dukungnya.<sup>32</sup>

Sasaran utama kebijakan ketahanan pangan di tingkat regional ASEAN difokuskan pada komoditas beras bagi semua negara, kecuali Thailand dan Vietnam, kedua negara tersebut mampu mempertahankan statusnya sebagai negara pengekspor beras bagi pemenuhan kebutuhan bahan pangan di kawasan ASEAN. Sebagaimana rumusan Bank Dunia menyangkut konsep ketahanan pangan yang meliputi tiga dimensi: ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilitas akses. Bank Dunia berusaha menyakinkan kepada masyarakat internasional bahwa usaha mewujudkan ketahanan pangan

---

<sup>32</sup><http://home.hiroshima-u.ac.jp/~yamao/syokumotu/seika2012-4b.pdf>, diakses 19 Oktober 2012.

dapat dilakukan melalui mekanisme perdagangan internasional dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Mengurangi kesenjangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan konsumsi bahan pangan;
- b. Mengurangi variabilitas pasokan bahan pangan;
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. Membuat lebih efisien penggunaan sumber daya dunia.

Banyak literatur yang menemukan adanya efek positif bagi perekonomian secara keseluruhan dari perdagangan bebas dan dalam banyak kasus juga mendorong terwujudnya ketahanan pangan melalui peningkatan penyediaan berbagai komoditas bahan pangan dan meningkatkan kapasitas impor bahan pangan. India dan China sebagai contoh negara yang berhasil mewujudkan swasembada pangan juga tidak mampu menjamin akses penyediaan kebutuhan pangan bagi sebagian besar warga negaranya. FAO (*Food Agriculture Organization*) menemukan bahwa sektor pertanian di negara-negara berkembang baru memberikan kontribusi sebesar 8% dari total keseluruhan komoditas perdagangan internasional. FAO juga menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap perdagangan produk pertanian (bahan pangan) tidak berarti bahwa perdagangan produk pertanian bahan pangan memberikan kontribusi terhadap terjadinya kerawanan pangan.

Beberapa isu-isu utama kaitannya dengan ketahanan pangan regional ASEAN, diantaranya sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>[http://www.searca.org/web/e\\_library/asian%20journal%bello.pdf](http://www.searca.org/web/e_library/asian%20journal%bello.pdf), diakses 19 Oktober 2012.

## 1. Dampak liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan

Mengutip laporan lembaga internasional baik WTO (World Trade Organization) maupun FAO memberikan catatan penting bahwa liberalisasi perdagangan turut berkontribusi terhadap terjadinya masalah ketidakamanan bahan pangan, disebabkan oleh lemahnya aspek kelembagaan dalam menghadapi persaingan global dan redistribusi bahan pangan dalam menjamin kelancaran dan pemerataan distribusi bahan pangan secara merata, serta masalah kemiskinan yang menjadi masalah klasik yang dihadapi oleh negara-negara berkembang berkaitan dengan kemampuan akses untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.

## 2. Pertumbuhan populasi penduduk dan penurunan kapasitas produksi pertanian

Secara global, pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan dari 3 persen per tahun pada tahun 1960 menjadi 2 persen per tahun pada pertengahan 1990-an. Negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan permintaan komoditas bahan pangan sejak dekade 1970 disebabkan oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk, pendapatan per-kapita yang relatif rendah dan pertumbuhan pendapatan yang belum merata. Terjadinya peningkatan pertumbuhan permintaan ini tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhan kapasitas produksi bahan pangan, sehingga diperlukan

---

<sup>34</sup>*Loc. Cit.*, 19 Oktober 2012.

mekanisme perdagangan internasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat di seluruh kawasan dunia.

Di tingkat regional ASEAN, populasi penduduk tercatat sebanyak 521.000.000 pada tahun 2000 dan tumbuh sebesar 1,5% per tahun di antara negara-negara berkembang (Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia) dan 1,9 persen pada ekonomi transisi (Kamboja, Laos, Myanmar dan VietNam). Tingkat kebutuhan energi makanan per kapita diantara negara-negara ASEAN berkisar dari kategori tinggi sebesar 2.930 kkal di Indonesia dan 2.900 kkal di Malaysia, kategori rendah dari 1.980 kkal di Kamboja dan 2.150 kkal per hari di Laos.

Swasembada pangan yang berhasil diwujudkan ASEAN sejak awal 1970-an, mencapai peningkatan besar dalam produksi pangan selama 20 tahun terakhir. Pada akhir 1990-an, negara-negara kawasan ASEAN merupakan eksportir beras, tetapi menjadi pengimpor produk ternak. Semua negara-negara ASEAN kecuali Laos dan Filipina masuk dalam kategori eksportir mandiri pada komoditas bahan pangan.

Pertumbuhan produksi pangan di kawasan ASEAN rata-rata mengalami peningkatan yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk, sebagai indeks produksi per kapita selama rentang periode 1989-1991 meningkat dari 88 ditahun 1979-1981 menjadi 110 pada tahun 1999. Pertumbuhan ini tidak selalu diterjemahkan kedalam peningkatan pasokan untuk pemenuhan kebutuhan domestik regional ASEAN. Negara-negara

ASEAN rata-rata mencapai swasembada pangan dengan pertumbuhan di atas 100% bahkan ketika populasi penduduk juga mengalami peningkatan.

### 3. Sektor pertanian masih menjadi andalan penyediaan lapangan pekerjaan

Kekayaan negara ASEAN yang bersumber dari komoditas bahan pangan terus mengalami penurunan, sebagai misal, pada rentang periode 1979-1981, sektor pertanian menyumbang 25,3% dari total komoditas ekspor dan 11,5 persen dari total komoditas impor negara ASEAN. Pada tahun 1999, proporsi ini mengalami penurunan menjadi 9,7 persen dan 8 persen, karena perkembangan industri dan jasa yang cukup pesat. Namun sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam penyediaan lapangan kerja bagi sebagian besar negara-negara kawasan ASEAN. Meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam produksi pangan, ketahanan pangan tetap menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Di sebagian besar negara-negara ASEAN masih didominasi oleh produksi beras. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami resesi sebagai dampak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998, menunjukkan kerentanan wilayah terhadap kerawanan pangan. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan sangat tergantung pada aktifitas ekspor, impor, ketentuan perdagangan dan jaringan distribusi domestik.

### 4. Dampak krisis keuangan dan ekonomi

Krisis keuangan dan ekonomi yang dialami oleh beberapa negara ASEAN menunjukkan kerentanan Negara ASEAN terhadap terjadinya

kerawanan pangan. Strategi untuk mengatasi kerawanan pangan antar Negara ASEAN dengan meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan dan mengembangkan kawasan pedesaan berbasis agro-industri. Upaya ini melibatkan peningkatan produktivitas ekonomi mikro, diversifikasi produksi pertanian, peningkatan infrastruktur dan lembaga untuk meningkatkan pertumbuhan pertanian dan pedesaan, peningkatan layanan dukungan untuk usaha agro skala kecil dan menengah.

Terdapat konsensus umum di antara negara-negara ASEAN yang menangani masalah keamanan pangan memerlukan perhatian terhadap isu-isu makroekonomi, seperti: pertumbuhan, ketahanan pasar, dampak dari pembayaran utang dan infrastruktur fisik dan kelembagaan untuk distribusi, serta isu-isu ekonomi mikro, seperti produktivitas pertanian, tingkat diversifikasi dan spesialisasi dalam produksi dan ketersediaan anggaran pangan rumah tangga di kalangan kaum miskin pedesaan.

Masalah terbesar ketahanan pangan antar Negara ASEAN ditemukan di negara termiskin, seperti: Laos, Kamboja dan Myanmar. Brunei Darussalam dan Singapura relatif menikmati kemakmuran, sementara mereka tidak memiliki ekonomi agraria, tidak menghadapi masalah ketidakamanan makanan yang serius. Sebagai negara yang berkembang pesat dalam proses perdagangan dan reformasi ekonomi, Malaysia, Filipina, dan Indonesia lebih memungkinkan mengalami masalah stabilitas makroekonomi daripada masalah ketahanan pangan dalam arti yang luas. Sementara itu, Vietnam dan Thailand, menjadi negara eksportir bahan

pangan khususnya komoditas beras mengalami pergeseran menuju diversifikasi perdagangan produk makanan dan pertanian.

## **B. Upaya-upaya Bersama ASEAN dalam Mengatasi Masalah Ketahanan Pangan**

ASEAN memiliki kesepakatan bersama tentang keamanan pangan yang menyangkut pembagian stok atau persediaan komoditas beras. Sebuah persediaan makanan darurat didirikan pada tahun 1979 (pada masa awal berdirinya telah memiliki kapasitas cadangan persediaan beras sebanyak 53.000 metrik ton beras) yang semua anggotanya masing-masing bisa menarik diri pada saat kebutuhan mendesak. Negara-negara ASEAN juga memiliki sistem informasi daerah ketahanan pangan.

Beberapa program yang ditargetkan dalam mendukung ketahanan pangan regional ASEAN, meliputi:

1. Penguatan database statistik ketahanan pangan ASEAN yang menyajikan informasi teknis dan bantuan lembaga dalam bidang pangan;
2. Membentuk badan yang membidangi masalah keamanan cadangan bahan pangan untuk mengkompilasi, mengelola dan menyebarluaskan data statistik dan informasi tentang keamanan pangan dan membukajalan bagi perencanaan yang lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dan perdagangan di kawasan ASEAN;



3. Pengembangan kerangka umum untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan perdagangan bebas komoditas bahan pangan sesuai dengan kerangka AFTA (*ASEAN Free Trade Area*);
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi pertanian dalam sistem pemasaran pangan untuk mendukung percepatan ketahanan pangan ASEAN;
5. Pembangunan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Regional ASEAN yang memungkinkan negara-negara anggota untuk secara efektif meramalkan, merencanakan dan mengelola persediaan makanan mereka dan pemanfaatan untuk komoditas dasar secara *up-to-date* serta memberikan informasi bagi investor untuk melakukan investasi dan usaha patungan dalam produksi makanan di daerah-daerah yang kondusif;

Berbagai program yang ditargetkan di atas juga telah diadopsi di berbagai negara. Sebagian besar negara-negara anggota kecuali Brunei dan Singapura (yang tidak memiliki sektor pertanian yang signifikan) memiliki program yang menargetkan pada keamanan pangan di tingkat rumah tangga, ekonomi mikro dan reformasi struktural dalam agro-industri, mengatasi masalah keterbatasan lahan dan sumber irigasi, dan program penguatan pasar, mekanisme kredit sektor pangan dan meningkatkan infrastruktur terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan. Sebagai contoh, program penghapusan kelaparan dan pengurangan kemiskinan di Vietnam dan Laos. Ketiga negara tersebut, yaitu Vietnam, Laos dan Kamboja, pembangunan

pertanian sistem tadah hujan, diversifikasi tanaman dan peternakan menjadi prioritas pembangunan sektor pangan.

Di Thailand, penekanan program ketahanan pangan lebih difokuskan pada sistem pertanian terpadu terkait dengan sistem penyediaan pasokan air yang cukup dan masalah irigasi. Di Indonesia, program ketahanan pangan difokuskan pada pengembangan sektor agrobisnis untuk mengatasi masalah gizi dan mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga. Di Filipina, penekanan dilakukan pada upaya mempromosikan produksi tanaman bernilai tinggi dan penguatan infrastruktur pedesaan dan penguatan sistem irigasi, dukungan layanan kelembagaan kredit bagi pengembangan usaha agrobisnis.

Kebijakan utama dari Negara ASEAN berkaitan dengan komoditas beras adalah pencapaian swasembada beras pada semua negara anggota ASEAN khususnya Thailand dan Vietnam sebagai lumbung beras regional ASEAN. Hal ini penting untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing produk pangan regional ASEAN di tingkat global, mengurangi kebijakan impor dalam memenuhi kebutuhan persediaan beras pertanian berdasarkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif.

Berkaitan dengan upaya mengatasi masalah ketahanan bersama regional ASEAN, perlu adanya konsepsi yang dirumuskan mengarah kepada suatu konsep operasional yang efektif, berdasarkan kesepatan antar pemimpin negara baik ditingkat pengambil kebijakan maupun di tingkat teknis operasional untuk menghindari adanya peraturan atau kebijakan yang saling bertentangan. Penekanannya pada pengembangan pangan pokok alternatif,

sehingga tidak terjadi eksploitasi pada satu jenis sumberdaya alam saja, khususnya beras sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat ASEAN.<sup>35</sup>

Tujuan utama dari rumusan konsepsi atau kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk meningkatkan produk unggulan di wilayah terpencil. Khususnya, pertanian dan pangan sehingga masyarakat wilayah-wilayah terpencil di Indonesia tidak mengalami kelaparan.

Dengan meningkatkan produk unggulan, diharapkan timbul motivasi masyarakat untuk mengelola dan mengolah sumberdaya alam wilayahnya. Apabila produk unggulan di wilayah-wilayah berbeda, hampir dapat dipastikan di masing-masing wilayah dapat dikembangkan sentra-sentra produksi. Sehingga akan berdiri kota-kota agropolitan.

Keadaan demikian dapat memberikan *multiplier effect*, dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakatpun akan meningkat, dan ketahanan pangan individu atau keluarpun dapat terwujud. Pada tahapan selanjutnya ketahanan pangan keluarga akan berdampak terhadap terwujudnya ketahanan pangan wilayah dan ketahanan pangan nasional.

Rumusan konsepsi yang dimaksud di atas merupakan suatu kebijakan yang bersifat utuh dan menyeluruh, mampu melihat ke depan, dan menggambarkan konsistensi kebijakan negara-negara ASEAN di sektor

---

<sup>35</sup>Didit Herdiawan, 2012. *Ketahanan Pangan dan Radikalisme*, Jakarta: Penerbit Republika, hlm. 126.

pertanian yang dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan kondisi, karakteristik serta kebutuhan masing-masing negara anggota ASEAN. Rumusan konsepsi yang dimaksud adalah bersifat utuh dan menyeluruh, mampu melihat ke depan, dan menggambarkan konsistensi kebijakan pemerintahan negara ASEAN di sektor pertanian yang dapat diimplementasikan berdasarkan skala prioritas dan daya dukung yang ada. Selanjutnya kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa strategi dan upaya, sebagai solusi alternatif dari masalah dan persoalan yang dihadapi dalam meningkatkan produk unggulan wilayah.

Rumusan kebijakan tersebut adalah reaktualisasi kondisi sosioekonomi masyarakat berbasis ketahanan pangan. Kebijakan bersama ASEAN menjadi acuan dalam merumuskan berbagai strategi dan upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat Indonesia di wilayah terpencil. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Tujuan

Upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat ASEAN khususnya yang tinggal di wilayah terpencil dari pusat akses aktifitas perekonomian dan pemerintahan dan bersifat berkelanjutan adalah: diversifikasi pangan, pengembangan agroindustry dan agrobisnis untuk meningkatkan produk unggulan di wilayah terpencil, khususnya pertanian dan pangan.

---

<sup>36</sup> *Loc. cit.*, 2012, hlm. 128

b. Sasaran

Objek yang ingin dicapai dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat ASEAN khususnya yang tinggal di wilayah terpencil adalah sebagai berikut:

1) Keberpihakan elite politik pada bidang pertanian

a) Pemerintah pusat dan daerah di masing-masing negara anggota ASEAN

Terciptanya keberpihakan pemerintah pusat dan daerah terhadap pengelolaan bidang pertanian dengan membangun infrastruktur, sarana prasarana pendukung, memfasilitasi pelaku pertanian dengan lembaga/instansi terkait, menyediakan kebutuhan dasar pertanian, serta menjaga konsistensi hasil dan stabilitas harga produksi pertanian.

b) Dewan Perwakilan Rakyat/Legislatif di tingkat kelembagaan negara anggota ASEAN

Terciptanya peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada sektor pertanian dengan melahirkan regulasi yang melindungi peruntukan lahan pertanian dan kebutuhan dasar pertanian.

c) Komponen masyarakat cendekiawan

Terciptanya komponen masyarakat cendekiawan yang berpihak pada sektor pertanian dengan memberikan pemikiran dan perbuatan yang dapat meningkatkan pengembangan pertanian secara luas.

d) Kelompok pengusaha

Terciptanya pengusaha-pengusaha yang berpihak pada pelaku pertanian dengan memperlakukan para petani sebagai mitra usaha yang harus saling menguntungkan.

2) Terwujudnya sumberdaya manusia di bidang pertanian yang berkualitas, terdiri dari:

a) Pelaku pertanian

Terciptanya petani-petani yang mampu mengelola lahan pertanian secara optimal, baik dengan memanfaatkan teknologi maupun tanpa teknologi tinggi, serta mampu membaca perkembangan pasar, memiliki naluri membaca alam dan memiliki tekad dan etos kerja yang tangguh.

b) Pendukung pertanian

Terciptanya para pendukung sektor pertanian yang memiliki keahlian, pemikiran dan perbuatan serta komitmen yang berpihak kepada pertanian, memiliki ketulusan hati untuk mendukung dan membantu secara langsung para petani dalam mengembangkan pertanian maupun mengatasi segala permasalahannya.

c) Regulator pertanian

Terciptanya peran lembaga regulator pertanian yang mampu mengatur dan melindungi seluruh aspek kehidupan dan kegiatan yang berkaitan dengan sektor pertanian agar berjalan dan maju sesuai dengan yang diharapkan.

d) Pendidik pertanian

Terwujudnya peran lembaga pendidikan agar mampu menerapkan berbagai perkembangan disiplin ilmu pertanian dan mampu mencetak kader-kader pertanian yang tangguh dalam arti luas.

3) Terwujudnya penguasaan pemanfaatan kemajuan teknologi tepat guna dibidang pertanian dan agroindustri, yaitu:

a) Efisien dan efektif

Terwujudnya pemanfaatan teknologi untuk produk-produk pertanian yang efisien dalam penggunaan energy, *spare part* dan tahan lama penggunaannya serta maksimal produksinya.

b) Murah, bermutu dan buatan dalam negeri

Terciptanya sarana dan produk pertanian (saprodi) berteknologi yang terjangkau daya beli petani dan barangnya tersedia di dalam negeri serta mutunya dapat diandalkan.

c) *High profit* dan mudah mengoperasikan

Terciptanya fasilitas produksi pertanian berteknologi yang mampu menghasilkan produksi sebesar-besarnya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya serta mudah dalam mengeoperasionalkannya.

4) Terwujudnya permodalan dan investasi yang cukup untuk mengembangkan sektor pertanian, meliputi:

a) Pemerintah

Terciptanya keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku pertanian dengan menjamin serta memfasilitasi berbagai kebutuhan

finansial pelaku-pelaku pertanian di seluruh nusantara, tanpa harus memaksakan agunan yang sepadan.

b) Investor/pemodal

Terciptanya keinginan para investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor pertanian dan memiliki kehendak serta komitmen membangun dan mengembangkan sarana prasarana pendukung kegiatan sektor pertanian.

c) Lembaga keuangan

Terciptanya pengembangan lembaga keuangan yang merapat ke daerah-daerah sektor pertanian dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pelaku pertanian tentang mekanisme, prosedur dan aturan main simpan pinjam keuangan.

d) Koperasi

Terciptanya peran koperasi pertanian yang tangguh dan kokoh di tengah-tengah masyarakat tani.

5) Terwujudnya peranan optimal dari berbagai tokoh masyarakat

a) Tokoh masyarakat

Terciptanya peranan aktif tokoh masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan organisasi dan kegiatan sebagai arena dan media tukar pikiran tentang pertanian

b) Tokoh adat



Terciptanya peranan aktif tokoh adat, dalam mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan kegiatan dan perkumpulan adat sebagai arena dan media tukar pikiran tentang pertanian.

c) Tokoh agama

Terciptanya peranan aktif tokoh agama dalam mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan kegiatan dan perkumpulan ibadah sebagai tempat dan media tukar pikiran tentang pertanian.

d) Tokoh pemuda

Terciptanya peranan aktif tokoh pemuda dalam mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan kegiatan kepemudaan sebagai arena dan media tukar pikiran tentang pertanian.

e) Tokoh-tokoh lainnya

Terciptanya peranan aktif tokoh-tokoh lainnya dalam mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan kegiatan dan organisasinya sebagai arena dan media tukar pikiran tentang pertanian.

6) Terwujudnya perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat di wilayah terpencil guna meningkatkan ketahanan pangan

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di wilayah terpencil dalam meningkatkan ketahanan pangan sangat diharapkan bagi pemerintah dan masyarakat. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan secara langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan ketahanan pangan dapat berupa:

a) Bantuan pendidikan

Pemberian bantuan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat daerah tertinggal agar dapat meningkatkan pemberdayaan potensi yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat guna mencegah berkembangnya radikalisme dalam rangka ketahanan nasional.

b) Bantuan sarana dan prasarana

Pemberian bantuan guna meningkatkan sarana dan prasarana seperti fasilitas jalan, jembatan, dan lain-lain. Sehingga masyarakat wilayah terpencil di negara-negara anggota ASEAN memiliki aksesibilitas (ukuran kenyamanan) dalam mendistribusikan potensi wilayahnya guna meningkatkan ketahanan pangan.

c) Program bapak asuh

Perusahaan pelaku CSR menempatkan sebagai bapak asuh, dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat di wilayah terpencil agar dapat meningkatkan mutu produksi, sehingga dapat meningkatkan mutu dan jumlah produksi perusahaan.

Sebagai tindak lanjut penjabaran kebijakan bersama ASEAN sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, maka disusun enam strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat ASEAN khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari akses pusat kota dan perekonomian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Strategi 1: Mengaktualisasikan kebijakan diversifikasi pangan dan pengembangan produk unggulan daerah terpencil melalui metoda regulasi/deregulasi, sosialisasi, edukasi, fasilitasi, koordinasi agar dapat meningkatkan ketahanan pangan

Strategi ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang *decentralistic bottom-up*, dalam sektor pertanian yang diarahkan untuk mengembangkan pendekatan agrobisnis dalam perspektif meningkatkan pendapatan rakyat. Peran fasilitasi dari pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ekonomi makro dan perdagangan, pelayanan dan pengaturan, penyediaan sarana dan prasarana publik, serta intervensi pasar agar tercipta pasar agrobisnis pangan yang berkeadilan.

Kebijakan agrobisnis melalui aktualisasi diversifikasi pangan dan pengembangan produk unggulan daerah terpencil yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Dimaksudkan pula untuk bersinergi dengan sektor-sektor pembangunan nasional lainnya, terutama dalam meningkatkan produk unggulan wilayah.

Khususnya, pertanian dan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan regional ASEAN sehingga mampu memperkuat stabilitas dan kemampuan penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat ASEAN di masa-masa mendatang, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Metode yang digunakan adalah fasilitasi, edukasi,

regulasi/deregulasi, sosialisasi, insentif, dan kerjasama/kemitraan antar negara anggota ASEAN.

Perwujudan strategi ini memerlukan sinergi antara suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur, khususnya dari pihak eksekutif baik pusat maupun daerah, legislative, pelaku ekonomi dan lembaga keuangan, serta masyarakat kawasan ASEAN. Sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan terutama berupa dukungan legalitas formal, misalnya melalui UU, keputusan presiden, peraturan daerah dan lain-lain.

- b. Strategi 2: Meningkatkan kualitas SDM sektor pertanian dan pangan, beserta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana melalui metode sosialisasi, edukasi, fasilitasi, koordinasi agar dapat meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mampu mencegah berkembangnya radikalisme

Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas SDM di sektor pertanian dan pangan, terutama pelaku usaha sektor pertanian dan pangan, pengelola UKM dan koperasi, lembaga keuangan mikro, dan pedagang bidang pertanian yang lebih produktif dan berdaya saing. Selain itu, mampu mengelola dan mengembangkan jaringan di seluruh sistem perekonomian pangan, yang terdiri dari subsistem penyediaan pangan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi yang saling berinteraksi secara berkesinambungan.

Kualitas SDM di sektor pertanian dan pangan sangat mempengaruhi proses dan hasil produksi pertanian dan pangan. Kualitas SDM ini

diperlukan karena partisipasi masyarakat dimulai dari proses produksi, industri pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa pelayanan di bidang pertanian pangan.

Dalam proses produksi pertanian dan pangan, diperlukan inovasi-inovasi untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi, dan menjaga mutu produk. Semakin tinggi kualitas SDM pertanian dan pangan, akan semakin tinggi pula kemampuan menciptakan inovasi-inovasi baru, termasuk industri perbenihan (*off-farm*) di aspek hilir.

Peningkatan kualitas SDM ini perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang optimal, agar pengembangan kegiatan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan terwujud yang pada akhirnya mampu mendukung pencegahan terjadinya instabilitas dan gangguan iklim kondusif kawasan regional ASEAN dengan metode yang digunakan adalah sosialisasi, edukasi, fasilitasi dan koordinasi.

Perwujudan strategi ini memerlukan sinergi antara suprastruktur, infrastruktur dan substruktur, khususnya dari pihak-pihak pemerintah (pusat dan daerah), DPR/DPRD, para pelaku ekonomi, dan masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan adalah pengembangan rencana tata ruang dan program pembangunan, sarana pendidikan dan latihan, serta forum komunikasi dan dialog.

- c. Strategi 3: Mengoptimalkan fungsi lahan pertanian melalui metode sosialisasi, edukasi, fasilitasi, dan koordinasi agar dapat meningkatkan

ketahanan pangan sehingga mampu mencegah terjadinya instabilitas dan gangguan kondusifitas regional ASEAN

Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan akses lahan pertanian yang memadai bagi pelaku usaha sektor pertanian dan pangan, yaitu lebih meningkat dari kondisi rata-rata penguasaan lahan pertanian saat ini. Pemberian akses terhadap lahan tersebut tetap dalam konteks pengembangan pedesaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Mengoptimalkan lahan pertanian dilaksanakan dalam satu keterkaitan dengan pengembangan sektor lainnya, terutama terkait dengan penataan lahan dan pengembangan wilayah yang dapat meningkatkan hasil produksi pangan sehingga tercipta kondisi ketahanan pangan nasional yang mampu mendukung pencegahan masalah sosial dan gangguan stabilitas regional ASEAN sebagai dampak terjadinya masalah pangan, dengan metoda yang digunakan antara lain: regulasi/deregulasi, sosialisasi, edukasi, fasilitasi dan koordinasi.

Perwujudan strategi ini memerlukan sinergi antara suprastruktur, infrastruktur dan substruktur, khususnya dari pihak eksekutif, legislative, para pelaku ekonomi sektor pertanian dan agrobisnis dan masyarakat kawasan ASEAN. Sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan adalah kebijakan pengaturan lahan dan alokasi ruang, rencana tata ruang wilayah dan sarana penegakan hukum.

- d. Strategi 4: Mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna bidang pertanian dan pangan melalui metoda sosialisasi, edukasi, fasilitasi, kerjasama kemitraan agar dapat meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mampu mencegah terjadinya instabilitas regional ASEAN

Strategi ini bertujuan untuk menyediakan alternatif teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sektor pertanian dan pangan yang berbasis bahan dan teknologi setempat atau kearifan lokal, baik sebagai hasil pelestarian teknologi tradisional atau setempat, maupun sebagai hasil keluaran pengembangan lembaga litbang yang ada di setiap lembaga pemerintahan ASEAN yang membidangi urusan pertanian dan agroindustri.

Pengembangan teknologi tepat guna merupakan upaya bersama seluruh pelaku bidang pertanian dan pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mampu mencegah berkembangnya masalah kerawanan pangan yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan keamanan yang lebih kompleks, dengan menggunakan metode sosialisasi, edukasi, dan kerjasama kemitraan. Sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan adalah sistem informasi teknologi tepatguna yang mudah diakses masyarakat di pedesaan seluruh kawasan regional ASEAN, serta forum-forum kerjasama dan dialog antara stakeholder dan pemangku kebijakan sektor pertanian dan agroindustri.

Implementasi strategi-strategi perwujudan ketahanan pangan memiliki peran dan fungsi sentral sebagai faktor pendukung keberhasilan pembangunan

sektor pertanian dan pangan. Kondisi ini sangat ditentukan oleh aktualisasi kebijakan pemerintah dan masyarakat ASEAN di bidang pertanian dan pangan yang mengalami perubahan paradigma menjadi *decentralistic bottom-up*. Disamping itu, perlu didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian dan pangan, adanya transformasi sosio-budaya yang diharapkan, pemanfaatan dan pelestarian lahan pertanian dari ancaman terjadinya alih fungsi lahan, penerapan teknologi tepat guna yang memberikan nilai tambah ekonomi, khususnya dapat dilakukan melalui pembangunan sistem usaha agrobisnis yang terpadu dan menyeluruh regional ASEAN, guna meningkatkan ketahanan pangan di wilayah terpencil sebagai basis ketahanan pangan regional ASEAN.

Pendekatan pengembangan agrobisnis atau usaha di bidang produksi dan distribusi dalam sektor pertanian, memerlukan sinergi dengan sektor-sektor lainnya secara terpadu dari hulu sampai ke hilir, mencakup pengembangan industri perbenihan, pemasaran, pengolahan, distribusi, transportasi, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan akses permodalan, dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai sebuah entitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peningkatan produk-produk unggulan di wilayah terpencil dalam cakupan regional ASEAN sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui peran fasilitasi pemerintah untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.